

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Teori *stewardship* adalah teori dimana kepentingan organisasi itu lebih dipentingkan, fokus pada sasaran tujuan organisasi serta tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu (Donaldson & Davis, 1991). Asumsi yang berkaitan dengan teori *stewardship* diciptakan berlandaskan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, dapat bertindak dengan tanggungjawab, mempunyai integritas, dan berlaku jujur terhadap pihak yang lainnya, dengan ini teori *stewardship* berpendapat bahwa manajemen selaku *stewards* lebih mementingkan kepentingan publik secara umum atau *shareholders* pada khususnya dan dapat berperilaku baik (Murwaningsari, 2009).

Teori ini mencerminkan keterkaitan yang kuat yaitu kepuasan dan kesuksesan tujuan organisasi. Capaian kesuksesan organisasi dapat diperoleh dengan cara memaksimalkan *utilitas principals* dan manajemen (Imran, 2015). Menurut Keay (2017) mereka akan bertindak dengan cara tertentu untuk mencapai pelayanan organisasi dibandingkan pelayanan individu dan lebih mengutamakan bekerja untuk organisasi.

Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi pemerintahan maupun yang non profit lainnya. Pemerintah desa harus memaparkan dan menjelaskan secara andal, jelas dan rinci yang berkaitan dengan informasi yang ada terkaitanya dengan akuntansi, beberapa pihak dan kalangan sangat membutuhkan dan memanfaatkan laporan keuangan desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk banyak kepentingan seperti untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya. Akuntansi organisasi sektor publik pada awalnya memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. selaku *stewards* tidak mudah untuk melakukan fungsi-fungsi pengelolaan secara individu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, hal ini membutuhkan beberapa peran, tidak hanya peran akuntansi yang dibutuhkan.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa laporan keuangan ialah laporan yang terstruktur berkaitan dengan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010). Informasi akuntansi sangat berguna dan harus dipahami, dokumen terpenting yang menghubungkan informasi akuntansi adalah laporan tahunan (Cheung *et al.*, 2010). Tujuan laporan keuangan sektor publik adalah sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan,

fungsinya yaitu untuk melaporkan hasil dari kegiatan operasi, melaporkan keadaan keuangan dan sumber daya yang dimiliki jangka panjang (Jones, 2010). Penggunaan informasi keuangan sektor publik dengan tujuan untuk membuat pemerintah yang memiliki tanggung jawab, untuk membantu dalam pengambilan keputusan politik, sosial, dan alokasi sumber daya yang efisien (Krambia *et al.*, 2016).

Laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Desa bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Setyowati *et al.*, 2016). Pentingnya kualitas dalam laporan keuangan ialah agar memudahkan para pemakai memahami informasi dari laporan keuangan tersebut. Kualitas laporan keuangan akan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, apabila kualitas laporan keuangan tersebut baik, maka hal tersebut memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas tentang laporan keuangan yang telah dibuat.

Laporan keuangan dibuat untuk mengambil keputusan, alat akuntabilitas publik, serta memberikan informasi yang diterapkan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, maka dalam setiap membuat laporan keuangan harus memenuhi kriteria atau sesuai dengan aturan yang telah diterapkan supaya laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya dan akurat. Hasil penelitian Nogueira *et al* (2013) menunjukkan bahwa kegunaan pelaporan keuangan yang cukup besar dikaitkan untuk

persiapan dan pengungkapan yang membantu pengambilan keputusan dengan cara yang rasional dan logis.

a. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas bila memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang ada di suatu laporan keuangan yang terhindar dari suatu kesalahan secara material, dan memberikan informasi sesuai dengan keadaan aslinya dengan terhindar dari manipulasi, bisa diverifikasi, serta terhindar dari memihak hanya kepada pihak tertentu yang membutuhkan.

2. Relevan

Suatu laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan yang relevan jika informasi dapat memberi pengaruh terhadap penggunanya dengan membantu meninjau kembali atau mengevaluasi peristiwa masa kini ataupun peristiwa masa lalu, memprediksi kejadian masa depan, dan dapat memberikan koreksi terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan di masa lalu. Informasi yang dikatakan relevan memiliki karakteristik memiliki manfaat bagi penggunanya, sesuai dengan waktunya, memiliki manfaat umpan balik, dan lengkap.

3. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan yang dapat dibandingkan apabila informasi yang ada dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah disajikan di suatu periode yang telah berlalu.

4. Dapat Dipahami

Suatu Informasi yang yang dihasilkan di suatu pelaporan keuangan mudah untuk dimengerti oleh penggunanya dengan dituliskan serta dipaparkan menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang telah diadaptasi dengan batas-batas pengetahuan penggunanya, dengan ini pengguna laporan keuangan dapat dikatakan memiliki pemahaman yang cukup.

b. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 pengelolaan keuangan desa harus menganut asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun. Sudah seharusnya laporan keuangan desa dibuat berdasarkan asas-asas di atas, supaya laporan keuangan lebih berkualitas dan mencukupi kebutuhan informasi yang dibutuhkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan pemerintah desa meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDes yang terdiri dari pendapatan dan belanja desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar.

d. Pelaporan

Pelaporan yang dilaporkan kepada Bupati melalui camat yaitu Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui camat yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDes, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar

Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah suatu karakteristik seseorang yang mempunyai keterampilan, pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan (Saraswati & Budiasih, 2019). Sedangkan sumber daya manusia menurut Antwi & Analoui (2008) adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi pencapaian organisasi, sumber daya manusia adalah penggerak, pemikir, serta perencana yang akan mencapai tujuan organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik. Sumber daya manusia sangat penting dalam perspektif pengetahuan dan ekonomi global. Kompetensi sumber daya manusia menurut Setyowati *et al* (2016) ialah kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan tugas serta tanggungjawab yang telah diberikan dengan berbagai bekal seperti pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi mencakup kapasitasnya, yaitu mencakup kemampuan individu, kemampuan suatu organisasi, atau bahkan suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya guna mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Setyowati *et al.*, 2016).

Peran sumber daya manusia sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan tujuan sektor publik. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten, nantinya akan mampu memengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan

keuangan. Maka adari itu sumber daya manusia harus berkompeten dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tanggungjawab, dalam hal ini yaitu akuntansi dan keuangan yang memiliki dampak pada pengelolaan keuangan.

4. Pemahaman Akuntansi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “paham” berarti pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman ialah proses memahamkan. Maka orang yang mempunyai pemahaman akuntansi ialah orang yang pandai dan mengerti dengan benar tentang akuntansi. Dalam hal tersebut orang dikatakan paham dengan akuntansi apabila dapat paham serta pandai bagaimana proses akuntansi dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan. Pemahaman ialah proses yang panjang dan bersifat individual maka pemahaman antara yang satu dengan yang lain berbeda. Hal itu disebabkan karena seseorang dalam memahami dapat dipengaruhi oleh ilmu, pengalaman serta kemampuannya masing-masing.

Menurut Mardiana & Fahlevi (2017) prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan ditujukan sebagai ketentuan yang wajib dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi, pelaporan keuangan pemerintah dalam melakukan kegiatannya serta pengguna laporan keuangan agar dapat memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat prinsip yang diterapkan pada akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu bisnis akuntansi, prinsip

nilai perolehan serta prinsip realisasi (Mardiana & Fahlevi, 2017). Apabila tidak adanya latar belakang akuntansi akan menyebabkan ketidakmampuan sumber daya manusia menganalisis laporan keuangan, dan akan mempengaruhi pemahaman laporan akuntansi internal yang digunakan dalam upaya mengelola pemerintahan yang efektif dan berkinerja baik (Nirwana & Haliah, 2018). Menurut Yuliani *et al* (2010) apabila seseorang tersebut memiliki pemahaman akuntansi yang baik maka orang tersebut dapat memahami komponen dari laporan prinsip akuntansi dan dapat memahami pengakuan unsur-unsur dalam pelaporan keuangan.

Proses/siklus akuntansi keuangan sektor publik menurut Nova (2015) yaitu:

- 1) Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lainnya. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang akan dicatat dalam laporan keuangan.

- 2) Analisis Buku Transaksi

Setiap transaksi harus disertai dengan bukti pendukung di dalamnya terdapat informasi mengenai kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi tersebut kemudian dianalisis serta digunakan untuk dasar pencatatan.

3) Mencatat Data Transaksi

Dari analisis bukti transaksi yang telah dilakukan, kemudian akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4) Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang Dicatat (*Posting*)

Di dalam buku besar terdapat daftar nama sekelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan akun yang telah ada, catatan atas transaksi dikelompokkan sesuai dengan nama masing-masing.

5) Penerbitan Laporan dan Catatannya

Satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar, dan berdasarkan catatan tersebut dibuat laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Laporan keuangan yang sudah disusun kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara guna menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan di berbagai organisasi (Mahayani *et al.*, 2017). Sistem teknologi informasi sangat mudah diakses, dan memberikan informasi yang akurat nantinya akan berdampak pada pelaksanaan operasi di semua sektor

(Donnelly *et al.*, 1994). Leung & Adams (2009) menyatakan bahwa dalam teknologi organisasi publik dikenal sebagai *e-government* yang terkait untuk penggunaan teknologi yang bisa meningkatkan efektivitas internal, proses dan transaksi lebih efisien.

Cloud computing merupakan bentuk baru dari sistem komputasi yang dasarnya dari internet dan masih dikembangkan ke berbagai bentuk salah satunya adalah layanan yang dipaparkan menggunakan cara yang hampir sama dengan utilitas tradisional (Fouladi & Navimipour, 2017). Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global (Setyowati *et al.*, 2016). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan serta jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Selain sebagai teknologi, komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga dapat berfungsi sebagai teknologi komunikasi guna penyebaran informasi. Teknologi informasi berguna dalam proses meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan pengumpulan, komputasi, penyimpanan dan komunikasi, dapat memberdayakan eksekutif dan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang berkualitas (Abraham, 2012).

Pemanfaatan teknologi sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, dan dapat terhindar dari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kemajuan dari teknologi informasi memudahkan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan atau potensi dalam hal ketepatan, konsistensi, keandalan, dan kemampuan menyimpan data yang besar (Setyowati *et al.*, 2016). Maka dari itu pemerintah harus memaksimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan pemerintah guna bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit (Mene *et al.*, 2018).

Indikator untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi menurut Wardani & Ika (2017) yaitu:

- 1) Proses kerja secara elektronik
- 2) Pengolahan dan penyimpanan data keuangan
- 3) Pengolahan informasi dengan jaringan internet
- 4) Sistem manajemen
- 5) Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer

6. Efektivitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa. Penggunaan siskeudes dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui surat Nomor B. 7508/01-16 tanggal, 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dan mengerti dengan bagaimana menggunakan aplikasi Siskeudes dalam mengelola keuangan desa (Gayatri & Latrini, 2018). Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan dimengerti dan dipahami oleh pemerintah desa karena aplikasi tersebut memiliki fitur yang sangat mudah untuk dimengerti. Aplikasi Siskeudes ini memiliki tampilan yang sederhana sehingga sangat baik untuk digunakan pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan. Aplikasi ini dapat digunakan dengan menggunakan jaringan internet dan dapat juga tidak menggunakan jaringan internet.

Aplikasi ini sudah dibuat dengan menyesuaikan proses dan tahap laporan keuangan serta dokumen-dokumen yang akan diinput saja. Proses penginputan dilakukan sesuai dengan transaksi, kemudian akan menghasilkan beberapa *output* berupa dokumen penatausahaan serta laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain: Dokumen Penatausahaan Surat Permintaan Penatausahaan, Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) Bukti Penerimaan, Surat Setoran Pajak (SSP), Buku Pajak, Laporan-laporan, Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana), Laporan Penatausahaan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu dan Register (Puspasari & Dendy, 2018). Sistem aplikasi siskeudes memiliki kelebihan yaitu: 1) sesuai dengan peraturan 2) memudahkan tata kelola keuangan desa 3) kemudahan dalam penggunaan aplikasi 4) aplikasi ini dilengkapi dengan sistem pengendalian internal intern (*built internal control*) 5) dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi (Puspasari & Dendy, 2018).

Penerapan aplikasi Siskeudes diharapkan dapat membantu menyelesaikan pekerjaan para aparatur desa yaitu kepala desa, dan pegawai desa, sehingga kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik dan efektif dengan adanya aplikasi tersebut. Maka apabila penggunaan aplikasi Siskeudes yang kurang efektif akan berdampak buruk bagi kinerja dan mutu pelayanan desa pada masyarakat (Sulina *et al.*, 2017).

Indikator untuk menilai efektivitas aplikasi siskeudes menurut Gayatri & Latrini (2018) yaitu:

1) Kecepatan dan ketepatan waktu akses

Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non periodik dalam rentang waktu yang sudah ditentukan.

2) Ketelitian

Ketelitian berhubungan dengan kebebasan pada kesalahan keluaran informasi. Kesalahan tersebut ada dua, yaitu: kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.

3) Variasi laporan atau *output*

Tingkat kemampuan sistem informasi teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan yang sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.

4) Relevansi atau kesesuaian

Relevansi sistem menyatakan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam analisis data, pelayanan, baik penyajian data, indikator ini menyatakan kesesuaian serta manfaat laporan yang dihasilkan (Bodnar & Hopwood, 2006).

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Teori *stewardship* menyatakan bahwa kepentingan organisasi itu lebih dipentingkan dan fokus pada sasaran tujuan organisasi serta tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu. Dalam penelitian ini sumber daya manusia yang dimiliki digunakan untuk kepentingan tujuan organisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Sumber daya manusia di dalam

penelitian ini akan dipaksakan agar dapat menguasai dan memiliki keahlian yang memadai serta memiliki tanggungjawab yang baik serta menambah pengalaman dan keahlian khususnya di bidang akuntansi. Apabila sumber daya manusia yang menjalankan sistem akuntansi kurang memiliki keahlian, tanggungjawab dan pengalaman di bidangnya, maka kemungkinan terbesar akan menimbulkan hambatan di dalam kegiatan serta pelaksanaan yang mencakup fungsi akuntansi dan laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agung & Gayatri (2018), Ramadhani *et al* (2018), Setyowati *et al* (2016) menghasilkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Suhardjo (2019) dan Hadiyati *et al* (2019) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kegagalan sumber daya manusia dalam menjalankan dan menerapkan akal sehat akuntansi akan menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya ketidak sesuaian antara standar pelaporan pemerintah dengan laporan keuangan yang dibuat sehingga akan memengaruhi tingkat kualitasnya menjadi rendah. Dengan hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka akan semakin tinggi pula

laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan hal di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa

1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Teori *stewardship* menyatakan bahwa kepentingan organisasi itu lebih dipentingkan dan fokus pada sasaran tujuan organisasi serta tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu dan untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan *utilitas principals* dan manajemen. Pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh sumber daya manusia berbeda-beda, karena pemahaman setiap orang tidak sama. Pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh sumber daya manusia di dalam penelitian ini digunakan untuk mementingkan tujuan organisasi yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa dengan cara meningkatkan *utilitas principals* atau keutamaan pemilik sebagai rakyat serta meningkatkan manajemen sebagai pemerintah desa. Di dalam penelitian ini sumber daya manusia akan dipaksakan dan memaksimalkan untuk memahami ilmu akuntansi, baik dari segi teori dan praktik terutama mengenai akuntansi sektor publik yang berupa transaksi,

analisis bukti transaksi, mencatat data transaksi, *posting*, serta penerbitan laporan dan catatan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Jika sumber daya manusia yang menjalankan sistem akuntansi memiliki pemahaman akuntansi yang rendah maka akan berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan yaitu penyajian laporan keuangan yang tidak tepat waktu dan akan menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Dewi (2020), Harlinda (2016), Mardiana & Fahlevi (2017) menghasilkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Atika *et al* (2019) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu pemahaman akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami akuntansi di lingkungan pemerintah desa akan menimbulkan dampak yang negatif yaitu rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, oleh karena itu pemahaman akuntansi sangat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, maka semakin tinggi pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh sumber daya manusia semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan hal di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H₂ : Pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan pemerintah desa.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Teori *stewardship* menyatakan bahwa kepentingan organisasi itu lebih dipentingkan dan fokus pada sasaran tujuan organisasi serta tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu dan untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan *utilitas pricipals* dan manajemen. Teknologi informasi merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempermudah, mempercepat proses pengolahan data yang berupa transaksi dan penyajian laporan keuangan, dalam hal tersebut yaitu penggunaan komputer dan jaringan internet, dengan hal tersebut laporan keuangan yang disajikan tepat waktu. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhani *et al* (2018), Harlinda (2016), dan Mene *et al* (2018) hasilnya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi atau sebagai indicator yang penting dalam laporan keuangan supaya dapat dikatakan berkualitas, peran dari pemanfaatan teknologi informasi bagi sektor pemerintahan yaitu digunakan untuk meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah desa, sehingga apabila pemanfaatan teknologi informasi semakin tinggi penggunaannya

maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan hal di atas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

3. Pengaruh Efektivitas Sistem Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

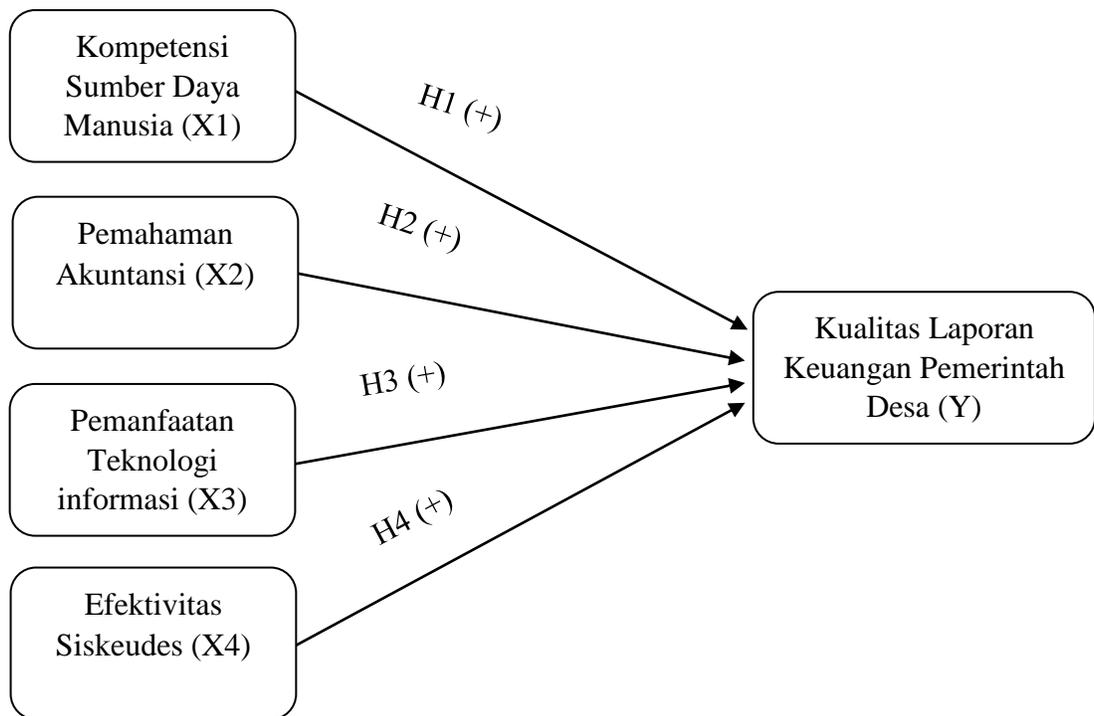
Teori *stewardship* menyatakan bahwa kepentingan organisasi itu lebih dipentingkan dan fokus pada sasaran tujuan organisasi serta tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu dan untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan *utilitas principals* dan manajemen. Di dalam penelitian ini aplikasi Siskeudes digunakan dan dimaksimalkan hanya untuk tujuan organisasi yaitu untuk pemerintah desa. Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dibuat oleh pemerintah untuk bisa memenuhi standar laporan keuangan, dimana aplikasi tersebut dibuat untuk meningkatkan mutu, kualitas tata kelola keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan desa.

Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sangat mempermudah perangkat desa dalam hal mengelola dan melaporkan keuangan desa, selain itu Siskeudes dapat membuat laporan keuangan lebih akurat dan pembuatan anggaran desa tepat waktu, supaya pencairan dana dari pusat bisa tepat waktu. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

penelitian Dewi & Mimba, (2014) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di pemerintahan Kota Denpasar secara keseluruhan termasuk dalam kriteria efektif serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Yusup (2016) mengatakan bahwa aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Gayatri & Latrini (2018). Penggunaan aplikasi Siskeudes harus dimaksimalkan dan harus efektif supaya dapat mencapai tujuan yang telah disusun oleh pemerintah desa yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa, sehingga semakin efektif dan semakin tinggi penggunaan aplikasi Siskeudes, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan hal di atas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Efektivitas sistem keuangan desa (Siskeudes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian